

**Daftar Rancangan Rencana Aksi**  
**Open Government Indonesia Tahun 2018-2020**

| No | Aksi  | Sasaran   | Indikator Capaian   | Rekomendasi Kementerian dan Lembaga Penanggung Jawab | K/L/D/I Terkait  |
|----|---|---|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  |
| 1  | Pembukaan Data Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership) yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik.          | Tersedianya publikasi data kepemilikan manfaat (beneficial ownership) yang terpusat dan dapat diakses oleh publik   | 1. Terlaksananya sosialisasi & penguatan kapasitas Transparansi kepemilikan manfaat (Perpres No.13/2018) kepada kementerian/lembaga, korporasi dan CSO<br>2. Tersedianya peraturan turunan Perpres 13/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait<br>3. Tersedianya peraturan yang memuat ketentuan tentang pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan informasi kepemilikan manfaat untuk mendukung pengembangan sistem pelayanan administrasi korporasi<br>4. Tersedianya daftar xx perusahaan yang termuat dalam sistem pelayanan administrasi korporasi dan sudah tervalidasi dan dipublikasikan | Kementerian Hukum dan HAM                            | Kementerian PPN/ Bappenas<br>Sekretariat EITI<br>PPATK<br>Kementerian Keuangan<br>Kemenko Perekonomian<br>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<br>Kantor Staf Presiden |
| 2  | Penyelenggaraan Forum Akuntabilitas Data Program Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan                               | Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data program perlindungan sosial bidang kesehatan yang melibatkan publik (partipatif)   | 1. Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data perlindungan sosial bidang kesehatan<br>2. Tersedianya daftar kementerian/ lembaga dan pemda yang melaksanakan forum akuntabilitas data<br>3. Tersedianya update data program perlindungan sosial bidang kesehatan yang diusulkan oleh forum akuntabilitas data   | Kementerian Sosial                                   | Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)<br>Kemenkes<br>BPJS Kesehatan  |
| 3  | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Keterbukaan Anggaran Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Penanggulangan Kemiskinan | Terpublikasinya data anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan hingga level kegiatan  | 1. Tersedianya SE kementerian keuangan untuk meminta setiap kementerian/ lembaga, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan untuk mempublikasikan data anggaran di website masing-masing<br>2. Tersedianya data anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan pada website masing-masing kementerian/lembaga  | Kementerian Keuangan                                 | Kementerian Pendidikan<br>Kementerian Kesehatan<br>Kementerian Sosial  |
|    |   | Tersedianya himbauan dan panduan bagi instansi publik untuk melakukan publikasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di tingkat pemerintah daerah | 1. Tersedianya SE Kementerian Dalam Negeri untuk meminta setiap daerah mempublikasikan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan untuk di publikasikan dalam website daerah  | Kementerian Dalam Negeri                             |  |
| 4  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendidikan                                 | Terlaksananya pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan yang partisipatif   | 1. Tersedianya indikator monitoring anggaran pendidikan yang dapat digunakan untuk mengukur dampak dari anggaran yang telah dialokasikan<br>2. Tersedianya mekanisme pemantauan bersama untuk mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan   | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                | Ombudsman RI   |
| 5  | Mendorong Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Desa yang Terbuka dan Partisipatif                              | Terlaksananya perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa yang terbuka dan partisipatif  | 1. Tersedianya revisi Permendagri No.113/ 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa<br>2. Tersedianya Permendagri No.114/ 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa<br>3. Tersedianya surat edaran terkait publikasi anggaran desa hingga unit cost sebagai bentuk transparansi terhadap proyek pembangunan di desa  | Kementerian Dalam Negeri                             | Kantor Staf Presiden<br>Bappenas   |
|    |   | Terlaksananya perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa yang terbuka dan partisipatif  | 1. Tersedianya revisi Permendes 2/2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa  | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal   |  |
| 6  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislati.             | Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat   | 1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui platform E-Legislati<br>2. Tersedianya platform e-legislasi dalam website DPRD   | Kementerian Dalam Negeri                             | Komisi Informasi Pusat<br>Kementerian Komunikasi dan Informatika (Informasi dan Komunikasi Publik)   |
| 7  | Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada                               | Terciptanya transparansi data kepemilikan   | 1. Terintegrasinya data penyelenggaraan pemilu pada portal satu data<br>2. Tersedianya perencanaan (roadmap) pengembangan e-recap yang terdiri dari studi kelayakan dan berbagai kebutuhan teknis lainnya<br>3. Tersedianya platform e-recap beta yang dapat diujicobakan di daerah   | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia             | Kantor Staf Presiden<br>Bawaslu RI<br>Kementerian Dalam Negeri<br>BPPT<br>DPR RI: Komisi II  |

| No | Aksi  | Sasaran   | Indikator Capaian   | Rekomendasi Kementerian dan Lembaga Penanggung Jawab              | K/L/D/I Terkait  |
|----|---|---|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  |
| 8  | Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik pemerintah       | Tersedianya informasi yang valid dan real time terkait ketersediaan obat, tenaga medis, kamar dan fasilitas kesehatan lainnya | Tersedianya informasi tentang ketersediaan layanan kesehatan (kamar, dokter, obat, dan lain sebagainya) di "xx" rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah  | Kementerian Kesehatan   | Kementerian Dalam Negeri   |
| 9  | Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Kementerian/ Lembaga dan Pemda di Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Sosial | Terlaksananya forum konsultasi publik di "xx" kementerian, "xx" provinsi dan kabupaten/kota                                   | Tersedianya "xx" daftar k/L, Pemda yang telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kementerian Kesehatan<br>Kementerian Sosial<br>Kementerian Desa dan PDT<br>Kementerian Dalam Negeri |
| 10 | Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik dalam LAPOR!-SP4N  | Peningkatan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam LAPOR!-SP4N   | 1. Terbentuknya tim penanganan pengaduan di masing-masing K/L dan Pemda<br>2. Sebanyak "xx" persen pengaduan yang masuk ke LAPOR! telah ditindaklanjuti   | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | KSP, Ombudsman RI  |
| 11 | Pengembangan Sistem Layanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup yang terintegrasi            | Peningkatan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam sistem pengaduan dan pengawasan KLHK yang terintegrasi                | 1. Revisi Permen LH No.22/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusahaan Hutan.<br>2. Menerbitkan rancangan Permen tentang pengawasan<br>3. Tersedianya integrasi sistem pengaduan dan pengawasan di KLHK dan 50% UPTD KLHK   | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                        | Kementerian PAN dan RB<br>Kantor Staf Presiden<br>Ombudsman RI   |
| 12 | Peningkatan Transparansi terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa  | Terpublikasinya seluruh dokumen pengadaan dalam bentuk data terbuka   | 1. Menerbitkan Perka LKPP tentang publikasi data kontrak, kinerja rekanan dalam pelaksanaan pengadaan dan serah terima hasil pekerjaan.<br>2. Tersedianya teknologi yang berfungsi untuk memfasilitasi konversi data SPSE ke dalam Open Contracting Data Standard (OCDS).<br>3. Terhubungnya sistem daftar hitam (black listing) dengan database BO untuk mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa  | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   |
|    |   |   | 4. Menegaskan dokumen kontrak sebagai informasi terbuka dalam regulasi yang diterbitkan oleh KI Pusat   | Komisi Informasi Pusat  |  |
| 13 | Penguatan tata kelola penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia  | Tersedianya perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia                            | 1. Terselenggaranya konsultasi publik terkait draft Peraturan Presiden tentang Open Government Indonesia<br>2. Tersosialisasinya Peta Jalan keterbukaan pemerintah Indonesia<br>3. Indeks keterbukaan pemerintahan Indonesia terpublikasi kepada masyarakat luas<br>3. Teralokasinya dukungan pendanaan untuk pemerintah daerah dan CSO untuk memperkuat open government<br>4. Terpublikasinya SK terkait pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah Indonesia 2018-2020 | Bappenas  | Kantor Staf Presiden<br>Kementerian Luar Negeri<br>Kementerian Keuangan  |
|    | Penguatan pelaksanaan Open Government di 100 Kabupaten/ Kota  | Terfasilitasinya kapasitas dan rencana aksi open government di 100 Kabupaten/ Kota  | 1. 100 kota/ kabupaten telah mengikuti penguatan kapasitas yang disediakan oleh OGI<br>2. 50 kota/ kabupaten telah menyusun rencana aksi  | Kementerian Dalam Negeri  | Kementerian PAN dan RB<br>Kantor Staf Presiden<br>Bappenas   |